

**INSTITUSIONALISASI LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)
(Studi Kasus di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima)**

***INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC FOOD DISTRIBUTION INSTITUTION
(Case Study in the Lampe Village East Rasanae District City of Bima)***

Rahmatullaila¹⁾, Kliwon Hidayat²⁾, dan Ismulhadi²⁾

¹⁾Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

²⁾Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

¹⁾E-mail: rahmatullaila@gmail.com

ABSTRACT

Food security is an trending topic and is a global problem that is interesting to continue to be discussed. The problem of food security can not be separated from the three (3) main aspects, namely the aspect of production, distribution and consumption. One of the empowerment program of food security that is being done is the strengthening of the Public Food Distribution Institution Program or commonly abbreviated LDPM. The program provides grant assistance in the form of social capital (social assistance) to the combined group of farmer beneficiaries remedy used as venture capital to business units owned. Pemancar farmer groups are farmer groups that exist in the Lampe Village District of Rasanae Bima City most of whose members are food crop farmers and has received reinforcements LDPM program to reach the stage of independence. The success of the program need to be institutionalized norms or rules that exist in the program LDPM the combined members of farmer groups in order to target the norms or rules become part of the life style people of Lampe Village. This study aims to determine how the institutionalization LDPM members of farmer groups at the transmitter and how farmers understand. The study was conducted using qualitative descriptive approach and conduct in-depth interviews and observations to the informants as many as 30 people. Based on the research conducted is known that the members of the joint LDPM transmitter farmer groups have not been fully institutionalized because the norms that emphasized not fully accepted by members of the community because in line with the local wisdom that is in the region.

Key words : institusionalitation, food distribution institution, institutional, LDPM, food security

ABSTRAK

Ketahanan pangan adalah isu yang sedang hangat dan merupakan permasalahan global yang menarik untuk terus diperbincangkan. Permasalahan ketahanan pangan tidak terlepas dari 3 (tiga) aspek pokok yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Salah satu program pemberdayaan ketahanan pangan yang sedang dilakukan adalah program penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat atau biasa disingkat LDPM. Program ini memberikan bantuan modal berupa dana bantuan sosial (bansos) kepada gapoktan penerima program untuk dijadikan modal usaha untuk unit usaha yang dimiliki. Gapoktan Pemancar adalah gapoktan yang ada di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Kota Bima yang sebagian besar anggotanya merupakan petani tanaman pangan dan telah mendapat program penguatan LDPM hingga mencapai tahap kemandirian. Guna mensukseskan program tersebut perlu dilakukan pelembagaan norma-norma atau aturan yang ada pada program LDPM pada anggota gapoktan sasaran, agar norma atau aturan tersebut menjadi bagian dari pola hidup masyarakat Kelurahan Lampe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelembagaan LDPM pada anggota gapoktan pemancar dan bagaimana petani memaknainya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan melakukan wawancara mendalam dan observasi kepada informan sebanyak 30 orang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa LDPM pada anggota Gapoktan Pemancar belum sepenuhnya melembaga karena norma yang ditekankan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh anggota masyarakat karena tidak sejalan dengan kerifan lokal yang ada di wilayah tersebut.

Kata kunci : institusionalisasi, lembaga distribusi pangan, pelembagaan, LDPM, ketahanan pangan

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah keadaan dimana tercukupinya kebutuhan masyarakat akan pangan baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada periode waktu tertentu. Masyarakat takkan terlepas dari kebutuhan akan pangan. Masalah ketahanan pangan tidak dapat terelakkan jika pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan produktivitas bahan pangannya. Menurut Dewan Ketahanan Pangan (2006), Kerawanan Pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.

Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari pemenuhan kebutuhan masyarakat pedesaan sebagai sentra wilayah pertanian hingga ke tingkat yang lebih luas yaitu suatu negara. Permasalahan strategis dalam pengembangan ketahanan pangan dapat dilihat dari aspek-aspek (1) Produksi, terutama ketersediaan dan kecukupan di tingkat nasional, daerah dan rumah tangga; (2) distribusi, berupa pemerataan antar wilayah, antar waktu, dan antar golongan pendapatan masyarakat terutama keterjangkauan harga pangan strategis; dan (3) konsumsi meliputi peningkatan kualitas konsumsi gizi (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2002).

Kelurahan Lampe adalah salah satu kelurahan sentra penghasil pangan di wilayah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat karena memiliki luas wilayah persawahan paling luas jika dibandingkan kelurahan lain yang ada di Kota Bima. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut masyarakatnya pun sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani meskipun sebagiannya memiliki mata pencaharian sampingan lain.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 menyatakan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Petani Kelurahan Lampe membentuk suatu gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai wadah aspirasi dan organisasi yang merupakan tempat untuk berkumpul dan memecahkan masalah yang dihadapi di lapangan atau dalam berusaha tani. Gapoktan yang diberi nama Gapoktan Pemancar ini menjadi gapoktan yang aktif dan berkembang sehingga mendapatkan program penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Program penguatan LDPM merupakan program kementerian pertanian melalui badan ketahanan pangan, yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan wilayah melalui pengembangan unit usaha distribusi pangan dan unit pengelola cadangan pangan.

Program penguatan LDPM adalah program pemberdayaan melalui pemberian dana bantuan sosial untuk meningkatkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan serta pengembangan unit pengelola cadangan pangan yang ada pada gapoktan. Rancangan program penguatan LDPM melalui beberapa tahap yaitu tahap penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan pasca kemandirian. Gapoktan Pemancar memiliki 3 (tiga) unit usahapada penguatan Program LDPM dan telah mencapai pada tahap kemandirian.

Pengelolaan unit usaha milik gapoktan pada program LDPM memiliki beberapa aturan atau norma yang ditawarkan kepada anggota gapoktan untuk dijadikan sebagai pola kehidupannya sehari-hari. Norma ini diharapkan nantinya melembaga dan mampu menjadi kebiasaan pada masyarakat yang menjadi acuan dalam mengelola bahan pangan hasil usahatannya. Norma-norma yang ditekankan pada suatu program pemberdayaan biasanya hanya berlaku pada saat program berjalan saja, dan selanjutnya hilang bersamaan dengan berakhirnya program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana pelebagaan atau institusionalisasi LDPM pada Gapoktan Pemancar, dan (2) Untuk mengetahui bagaimana petani memahami program penguatan LDPM.

METODE PENELITIAN

Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja yaitu pada petani anggota Gapoktan Pemancar yang berada di daerah Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanæ Timur Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pertimbangan memilih lokasi didasarkan karena Gapoktan Pemancar telah mendapatkan program penguatan LDPM dan telah mencapai tahap kemandirian, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Pada program penguatan LDPM, terdapat tahap-tahap pemberdayaan yang

terdiri dari tahap penumbuhan, pengembangan, kemandirian dan pasca kemandirian. Tahap kemandirian adalah tahap dimana suatu program LDPM tidak lagi mendapat bantuan dana sosial untuk modal usaha, namun masih diberikan pendampingan dari petugas penyuluh lapangan dalam melaksanakan usaha baik dalam kegiatan perencanaan hingga ke pemecahan masalah yang dihadapi.

Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* atau sampling bola salju dimana sampel yang pada awalnya berjumlah sedikit kemudian semakin banyak disesuaikan dengan arah informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya. Teknik penentuan informan dengan metode ini diawali dengan memilih informan kunci kemudian dari situ akan mengarah ke informan selanjutnya yang dipertimbangkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Informan dalam penelitian berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari anggota dan pengurus gapoktan, penyuluh pendamping, pejabat dinas ketahanan pangan (*stakeholder*), serta semua yang terkait dalam program penguatan LDPM. Informan kunci pada penelitian ini adalah penyuluh pendamping, petugas dari badan ketahanan pangan dan pengurus Gapoktan Pemancar berserta unit usaha, sedangkan sisanya merupakan hasil dari metode *snowball sampling* yang dilakukan, yang mana penentuan orangnya berdasarkan data dan informasi dari informan kunci atau informan yang diwawancara sebelumnya.

Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, serta Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penggandaan (fotokopi) dokumentasi milik gapoktan maupun milik unit usaha gapoktan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan uraian verbal, tabel, maupun gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kota Bima adalah kota otonom yang terletak di sebelah timur Pulau Sumbawa tepatnya pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132.58 mm dengan hari hujan: rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Oktober, dengan suhu 19.5 °C sampai 30.8 °C.

Kelurahan Lampe merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kelurahan yang ada di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Kelurahan Lampe berada di sebelah timur Kota Bima yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bima. Adapun batas-batas wilayahnya antara lain :

- Sebelah Utara : Kelurahan Dodu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lambitu
- Sebelah Barat : Kelurahan Kodo
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo

Luas wilayah Kelurahan Lampe adalah 723 Ha. Pembagian tata guna lahan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. Dapat diketahui luas sawah ½ teknis seluas 112 Ha. Petani anggota Gapoktan Pemancar yang menjadi sasaran pelebagaan LDPM rata-rata memiliki sawah 0.5 Ha untuk usaha taninya, baik itu milik sendiri maupun sawah garapan. Kepemilikan lahan ini secara langsung mempengaruhi kepedulian petani masyarakat lampe akan ketersediaan cadangan pangan untuk rumah tangganya. Berdasarkan hasil penelitian Basri (2008) di Kabupaten Sumbawa, faktor umur, kepemilikan lahan, dan penguasaan lahan mempengaruhi peran masyarakat terhadap kelembagaan lumbung dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dapat diintegrasikan bahwa kepemilikan lahan pada masyarakat Kelurahan Lampe sedikit banyak mempengaruhi pola hidup masyarakatnya dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Pada Tabel 1 diketahui luas sawah ½ teknis seluas 112 Ha. Petani anggota Gapoktan Pemancar yang menjadi sasaran pelebagaan LDPM rata-rata memiliki sawah 0.5 Ha untuk usaha taninya, baik itu milik sendiri maupun sawah garapan. Kepemilikan lahan ini secara langsung mempengaruhi kepedulian petani masyarakat lampe akan ketersediaan cadangan pangan untuk rumah

tangganya. Berdasarkan hasil penelitian Basri (2008) di Kabupaten Sumbawa, faktor umur, kepemilikan lahan, dan penguasaan lahan mempengaruhi peran masyarakat terhadap kelembagaan lumbung dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dapat diintegrasikan bahwa kepemilikan lahan pada masyarakat Kelurahan Lampe sedikit banyak mempengaruhi pola hidup masyarakatnya dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Tabel 1. Pembagian Tata Guna Lahan Kelurahan Lampe Tahun 2013

Table 1. Distribution of the land use Lampe Village In 2013

No.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah teknis	-	0
2.	Sawah ½ teknis	112	15.5
3.	Sawah tadah hujan	-	0
4.	Tegal/lahan kering	108	14.9
5.	Pekarangan	13	1.8
6.	Kolam	-	0
7.	Hutan	475	65.7
8.	Lain-lain	36	4.9
Jumlah		723	100

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima Tahun 2014

Penduduk yang ada di Kelurahan Lampe memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, petani, pedagang dan lain sebagainya, namun bisa dikatakan bahwa mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, karena tak jarang mereka yang bekerja sebagai pedagang ataupun pegawai negeri memilih bertani sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan mereka. Lebih jelasnya pembagian penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2012

Table 2. Total Population by Livelihood In 2012

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (orang)
1.	Petani sendiri	273
2.	Petani penggarap	85
3.	Buruh tani	179
4.	Buruh bangunan	25
5.	Buruh industri	5
6.	Perdagangan	35
7.	Pegawai negeri sipil	70
8.	TNI / Polri	12
9.	Pensiunan	14
10.	Pengangkutan / Jasa	10
11.	Pengusaha / Pengrajin	4

Sumber: Data Monografi Kelurahan Lampe tahun 2013

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Lampe bermacam-macam, namun rata-rata masyarakatnya memilih bidang pertanian sebagai sampingan atau kegiatan untuk penghasilan tambahan. Misalnya saja seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau seorang TNI, hampir semuanya memiliki sawah atau ladang yang digarap untuk mengisi waktu sepuasnya dari rutinitasnya di kantor. Petani yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai pekerjaan pokoknya juga memiliki kegiatan lainnya sebagai sumber mata pencaharian lain untuk menambah penghasilan seperti beternak atau berdagang di pasar. Sehingga, tarap hidup masyarakat Kelurahan Lampe pada umumnya mencukupi.

Institusionalisasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Program LDPM yang ada di Kelurahan Lampe dimulai pada tahun 2009 dimana program ini merupakan program yang dicanangkan kementerian pertanian melalui badan ketahanan pangan dalam rangka menangani masalah ketahanan pangan. Ada 2 (dua) tujuan utama program ini yaitu menjaga

keseimbangan harga pangan dan menjamin ketersediaan cadangan pangan khususnya di wilayah pedesaan dan sekitarnya dimana program tersebut berjalan.

Permasalahan harga pangan merupakan masalah yang tidak dapat dihindarkan ketika suatu daerah sentra pangan dihadapkan pada panen raya sehingga menyebabkan anjloknya harga pangan. Ini tentu saja akan merugikan petani sebagai produsen. Program LDPM secara tidak langsung menjadi cara pemerintah dalam menentukan kebijakan harga pangan melalui penguatan modal pada unit usaha milik gapoktan. Berdasarkan penelitian dikemukakan bahwa kebijakan harga pangan mempengaruhi ketersediaan pangan terutama kebijakan harga output. Namun kebijakan harga pangan tidak efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan di tingkat nasional terbukti tidak menjamin akses pangan di tingkat rumah tangga. Jadi dalam menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani, penguatan kelembagaan petani merupakan langkah yang efektif untuk dilakukan (Ilham, N, Hermanto, S dan D.S Proyarsono, 2006).

Program LDPM memberikan dana bantuan sosial (bansos) kepada gapoktan penerima program untuk dikelola sebagai modal usaha yang diintegrasikan pada unit usaha yang dimiliki masing-masing gapoktan. Gapoktan Pemancar menerima dana bansos sebesar Rp 225,000,000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) selama dua tahap penerimaan. Dana bansos pertama kali diterima pada akhir Tahun 2009 sebanyak Rp 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada akhir Tahun 2010 yaitu pada tahap pengembangan sebesar Rp 75,000,000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dana Bansos yang diterima oleh Gapoktan Pemancar digunakan untuk pembangunan gudang cadangan pangan milik gapoktan dan sisanya digunakan sebagai modal tiga unit usaha yang dimiliki yaitu unit distribusi pangan, unit cadangan pangan, dan unit penggilingan.

Kegiatan ketiga unit usaha milik Gapoktan Pemancar secara garis besar adalah membeli gabah milik anggota gapoktan kemudian menyimpannya sebagai cadangan pangan dan sebagiannya dijual guna mendapatkan keuntungan. Menjalankan fungsi ketiga unit usaha tersebut berarti memantapkan fungsi gapoktan sebagai kelembagaan petani yang dapat menjadi wadah untuk kepentingan anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa kelembagaan kelompok petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur dan pasar, dan adopsi inovasi pertanian. Di samping itu keberadaan kelembagaan kelompok petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani (Anantanyu, 2008).

Pedoman Umum Pelaksanaan LDPM (2009), menguraikan tujuan utama yang ingin dicapai program LDPM adalah (1) terwujudnya stabilitas harga pangan wilayah, dan (2) terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani melalui penyediaan cadangan pangan wilayah. Berdasarkan tujuan tersebut aturan atau norma yang ditekankan pada program LDPM adalah anggota melakukan kegiatan pembelian dan penjualan gabah hasil usaha taninya melalui unit usaha milik gapoktan. Proses memasyarakatkan aturan atau norma tersebut disebut pelebagaan atau institusionalisasi.

Norma-norma atau aturan yang ada pada LDPM meliputi (1) keharusan anggota menjual gabah hasil usaha taninya pada unit distribusi pangan milik gapoktan, (2) ketika membutuhkan gabah untuk konsumsi membeli pada unit distribusi maupun cadangan pangan, (3) melakukan kegiatan penggilingan gabah pada unit usaha penggilingan milik gapoktan. Aturan ini diharapkan menjadi pola hidup atau kebiasaan masyarakat lampe khususnya anggota gapoktan sehingga menjadi norma yang melembaga dalam kesehariannya, dengan demikian LDPM tidak hanya menjadi program musiman melainkan menjadi lembaga masyarakat yang menjamin ketahanan pangan masyarakat wilayah tersebut.

Aturan norma yang ditawarkan dalam LDPM menitikberatkan pada penguatan gapoktan sebagai wadah kerjasama kelompok dalam mengelola cadangan pangan untuk kepentingan bersama. Unit usaha yang dimiliki gapoktan menjadi tokoh utama yang berperan dalam mengelola kebutuhan pangan untuk anggota. Dengan memaksiamalisasi kinerja gapoktan maupun unit usaha milik gapoktan dalam menjalankan fungsi ekonomi, maka ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Ini sejalan dengan hasil penelitian Amin Subagio tentang bagaimana strategi pengembangan kelembagaan pangan dalam pemantapan ketahanan pangan. Pemantapan ketahanan pangan dilakukan beberapa hal yaitu (1)

penguatan struktur dan kelembagaan pangan masyarakat, (2) Penguatan Ekonomi kelompok, dan (3) Pengembangan kapasitas individu petani (Amin Subagio, 2006).

Institusionalisasi LDPM merupakan proses pelembagaan norma-norma yang ada pada program LDPM menjadi norma-norma yang dijalankan dan ditaati anggota gapoktan sebagai peserta program. Suatu norma tertentu dikatakan melembaga (*institutionalized*), apabila norma tersebut dipahami, diketahui/dimengerti, ditaati dan dihargai (Soekanto, 2012).

Melalui institusionalisasi LDPM pada anggota Gapoktan Pemancar diharapkan anggota menjadikan norma tersebut sebagai bagian dari kebiasaan yang dilakukan dalam berusaha taninya sehingga selanjutnya tujuan program tersebut dapat tercapai. Program LDPM yang ada di Gapoktan Pemancar Kelurahan Lampe sudah mencapai tahap kemandirian, yaitu tahap dimana secara teknis gapoktan peserta LDPM dinilai telah mampu mengembangkan modal dari total dana modal yang diterima sebelumnya, serta dianggap telah mampu mengendalikan harga gabah dan anggota memperoleh akses pangan, namun berdasarkan penelitian di lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi pada anggota gapoktan diketahui bahwa LDPM belum sepenuhnya melembaga pada masyarakat Kelurahan Lampe khususnya anggota Gapoktan Pemancar. Hal ini dikarenakan masih banyak dari anggota gapoktan yang tidak menjual gabah hasil usaha taninya atau membeli kebutuhan akan pangan melalui unit usaha milik gapoktan. Keberhasilan unit usaha dalam mengembangkan modal usaha hingga dapat mencapai tahap kemandirian tidak sepenuhnya karena melembaganya LDPM pada anggotanya melainkan kemampuan pengurus dalam mengembangkan jaring pemasaran dari luar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui ada beberapa hal yang menjadi hambatan pelembagaan atau institusionalisasi LDPM pada anggota Gapoktan Pemancar.

A. Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Lampe

Kelurahan Lampe adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki luas areal persawahan paling luas jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di wilayah Kota Bima, lebih jelasnya telah disajikan pada sub bab sebelumnya yaitu pada keadaan umum lokasi penelitian. Meskipun sebagian masyarakatnya memiliki jenis mata pencaharian bermacam-macam, namun mereka tetap menggeluti usahatani sebagai bagian dari sumber mata pencaharian tambahan.

Berdasarkan kondisi di atas diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Lampe merupakan sebagian kecil masyarakat di wilayah Kota Bima yang masih menjunjung tinggi tradisi nenek moyang dalam kegiatan sehari-harinya, salah satunya yaitu tradisi menyimpan gabah di rumah sebagai lumbung pribadi. Hasil usaha tani yang berupa gabah oleh petani masyarakat lampe tidak langsung dijual melainkan disimpan terlebih dahulu di kolong rumah atau gudang yang ada di rumah mereka masing hingga musim panen yang akan datang. Pada umumnya padi yang disimpan akan dijual jika sewaktu-waktu membutuhkan uang atau telah sampai masa panen berikutnya sehingga akan ada gabah hasil panen baru yang akan disimpan.

Kebiasaan menyimpan gabah telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lampe sejak dari jaman nenek moyang hingga kini. Tempat menyimpan gabah pada umumnya yaitu di kolong-kolong rumah mereka sendiri yang memang dibangun untuk tempat menyimpan gabah, hasil panen lainnya atau peralatan bertani. Untuk petani yang memiliki rumah permanen dari beton maka mereka akan menyisihkan salah satu ruangan pada rumahnya untuk dijadikan gudang penyimpanan gabah. Salah satu contoh bentuk rumah penduduk yang disebut rumah panggung dapat dilihat pada gambar model rumah panggung petani Kelurahan Lampe.

Pada gambar model rumah panggung petani Kelurahan Lampe dapat dilihat bahwa terdapat dua tingkat ruang pada rumah yang mana pada tingkat bawah atau kolong rumah pinggirnya dipagari bambu atau kayu dengan rapi dijadikan tempat menyimpan segala macam hasil panen usaha taninya khususnya gabah, sedangkan pada bagian atasnya merupakan tempat petani tinggal. Rumah-rumah seperti pada gambar masih banyak kita jumpai di wilayah Kelurahan Lampe sehingga kearifan lokal masyarakatnya yaitu membuat lumbung sendiri masih tetapi dilestarikan hingga sekarang.

Selain telah menjadi tradisi, kebiasaan menyimpan gabah di rumah telah menjadi bagian dari nilai sosial yang ada di masyarakat Kelurahan Lampe, dikatakan demikian karena di masyarakat Kelurahan Lampe cenderung menjadikan keberadaan lumbung sebagai tolak ukur dalam menentukan lapisan sosial di masyarakat. Petani yang simpanan padinya lebih banyak cenderung lebih dihormati

dan dihargai daripada yang simpanan padinya sedikit karena yang isi lumbungnya lebih banyak dianggap lebih kaya.



Gambar Model Rumah Panggung Petani Kelurahan Lampe
Figure Farmers House Stage Model at Lampe Village

Kearifan lokal yang juga masih bisa dijumpai pada masyarakat Kelurahan Lampe adalah nilai sosial yang masih dipegang masyarakatnya yaitu rasa malu bila meminjam gabah atau beras pada orang lain atau petani. Ketika berada dalam kesulitan atau kekurangan bahan pangan untuk dikonsumsi petani malu untuk meminjam gabah atau beras pada petani lainnya atau gudang gapoktan, mereka cenderung memilih meminjam uang dan membeli sendiri gabah ke penggilingan padi ketimbang harus meminjam beras. Jika meminjam gabah atau beras petani tersebut takut menjadi bahan olok-olokan karena dianggap memiliki sawah dan bekerja di ladang tapi tidak mampu menghasilkan beras walau untuk makan sendiri.

Nilai – nilai yang ada dan masih dilestarikan petani Kelurahan Lampe sangat bertentangan dengan norma atau aturan yang ditawarkan oleh program LDPM dan hal inilah yang menyebabkan kearifan lokal masyarakat ini menjadi salah satu penghambat proses pelebagaan atau institusionalisasi LDPM pada anggota Gapoktan Pemancar. Program LDPM menekankan pada (1) kegiatan pembelian gabah milik anggota gapoktan, namun anggota gapoktan memiliki kebiasaan menyimpan hasil panen pada lumbung sendiri dan menjualnya menjelang panen mendatang atau ketika sewaktu-waktu butuh uang, (2) menyediakan gudang cadangan pangan pada gudang milik gapoktan untukantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi musim paceklik agar bisa dipinjam oleh anggota, akan tetapi nilai yang ada di masyarakat Kelurahan Lampe yaitu malu jika sampai meminjam beras padahal mereka bertani ditambah lagi rata-rata dari mereka memiliki lumbung pangan sendiri di rumahnya.

Budaya masyarakat lampe menyimpan gabah di rumah merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Pemberdayaan yang dilakukan seharusnya mengacu pada kearifan lokal yang ada sehingga tidak merubah nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lumbung pangan pribadi yang dimiliki masyarakat Kelurahan Lampe adalah salah satu cara menyiasati perubahan musim yang tidak pasti yang mereka hadapi. Pemberdayaan yang dilakukan mestinya menjadikan budaya membuat lumbung pribadi sebagai acuan perencanaan program pemberdayaan.

Program pemberdayaan yang banyak dilakukan mengacu pada pemberdayaan sektor ekonomi dengan tujuan meningkatkan pendapatan petani dengan harapan meningkatkan kesejahteraan. Mardikanto (2010) menambahkan jenis pemberdayaan yaitu pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pemberdayaan kelembagaan salah satunya

adalah pelebagaan LDPM. Pelebagaan LDPM merupakan suatu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang bersemer dari program pemberdayaan harus mengacu pada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat sebagai acuan dalam merencanakan suatu kegiatan pemberdayaan baik itu dari jenis pemberdayaan maupun model pemberdayaan yang akan dilakukan.

Revitalisasi Lumbung adalah salah satu kegiatan yang tepat untuk dilakukan pada masyarakat Kelurahan Lampe, mengingat kebiasaan masyarakatnya menyimpan gabah di rumah hingga musim panen berikutnya.

Lumbung desa tidak hanya hanya berfungsi untuk menyimpan padi untuk dikonsumsi, tetapi juga digunakan sebagai tempat menyimpan aneka benih tanaman. Setiap musim panen petani biasanya menyisihkan sebagian hasil panennya untuk ditanam lagi. Mereka memilih dan memilah padi, jagung, atau lainnya yang terbaik kualitasnya untuk dijadikan benih. Benih padi atau jagung ini biasanya dibiarkan utuh dalam malai atau tangkainya kemudian diikat dan disimpan di dalam lumbung desa. Benih yang disimpan di lumbung akan terjaga kualitasnya karena biasanya bangunan lumbung dirancang sedemikian rupa sehingga benih yang tersimpan tidak rusak karena pengaruh cuaca atau gangguan hama sampai saat benih akan digunakan pada musim tanam berikutnya.

B. Persaingan usaha dari pihak luar gapoktan

Pada setiap jenis kegiatan usaha khususnya jual beli barang atau komoditi tertentu, faktor persaingan tidak bisa terelakkan. Begitu pula yang terjadi pada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh unit usaha milik Gapoktan Pemancar. Faktor persaingan menjadi salah satu tantangan yang menghambat jalannya usaha. Persaingan usaha pada program LDPM yang ada di Gapoktan Pemancar berasal dari pembeli gabah atau beras dari luar sekitar wilayah Kelurahan Lampe yaitu pedagang dari Kelurahan Dodu dan Nungga.

Pedagang dari luar wilayah memberikan tawaran harga pembelian yang lebih mahal dari yang ditawarkan unit usaha milik gapoktan, tentu saja ini menarik minat anggota gapoktan yang akan menjual gabahnya untuk lebih memilih menjual ke pedagang luar daripada menjual ke unit usaha milik gapoktan. Harga yang ditawarkan meskipun hanya memiliki sedikit perbedaan, namun mampu menarik minat anggota gapoktan untuk menjual gabah atau berasnya ada pedagang di luar unit usaha milik gapoktan. Adanya persaingan ini tentu saja mengurangi aktivitas jual beli yang dilakukan unit usaha milik gapoktan sehingga secara langsung mengurangi peluang keuntungan yang seharusnya dimiliki gapoktan.

Persaingan yang muncul karena permainan harga dan mengambil alih minat anggota dalam penjualan gabah atau beras pada unit usaha, tentu saja pada akhirnya menyebabkan anggota tidak mentaati aturan atau norma yang ditawarkan dalam program penguatan LDPM. Selanjutnya LDPM pada anggota gapoktan tidak sepenuhnya melembaga sesuai dengan yang diharapkan, LDPM tidak akan menjadi bagian dari pola perilaku usaha tani yang ada pada anggota gapoktan.

C. Pemaknaan Petani terhadap Program LDPM

Program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat adalah program pemberdayaan masyarakat yang mengatasi masalah ketahanan pangan. Kesuksesan suatu program pemberdayaan tak lepas dari partisipasi anggota sebagai sasaran pemberdayaan, sedangkan partisipasi masyarakat dibangun dari pemahaman positif terhadap program yang diterimanya.

Pemaknaan anggota Gapoktan Pemancar terhadap program LDPM di Kelurahan Lampe menjadi salah satu penyebab mudah atau sulitnya aturan atau norma LDPM untuk dilembagakan pada anggota, selanjutnya ini menjadi faktor penunjang keberhasilan program penguatan LDPM. Anggota gapoktan mengenal program LDPM melalui sosialisasi pengurus gapoktan beserta penyuluh pendamping dan petugas dinas ketahanan pangan melalui kegiatan pertemuan yang rutin dilakukan. Melalui sosialisasi diharapkan petani memahami maksud dan tujuan dari program LDPM dan memahami aturan yang ditekankan pada program tersebut.

Pada program penguatan LDPM yang ada di Kelurahan Lampe petani awalnya menerima masuknya program LDPM dan mematuhi aturan yang ada yaitu melakukan jual beli gabah hasil panen pada unit usaha milik gapoktan, namun pada prosesnya petani memaknai program LDPM seperti program pemberdayaan lainnya yang memberikan kredit bantuan modal atau pinjaman saprodi untuk kegiatan usaha tani. Dana bantuan sosial pada program LDPM lebih diharapkan menjadi dana pinjaman untuk modal usaha dibandingkan bentuk pinjaman bahan pangan.

Pemahaman yang tidak sesuai tentang penggunaan dana bansos ini menjadi salah satu penghambat kegiatan program penguatan LDPM, dengan demikian aturan atau norma yang ditekankan pada pelembagaan LDPM tidak dapat menjadi bagian dari pola hidup masyarakat Kelurahan Lampe. Ketidaksesuaian maksud dan tujuan program LDPM dengan harapan masyarakat merupakan dampak dari pemahaman atau pemaknaan yang salah mengenai program yang LDPM yang disampaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemaknaan anggota gapoktan merupakan salah satu poin penting yang mempengaruhi proses pelembagaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat pada Masyarakat Lampe khususnya anggota Gapoktan Pemancar.

Pelembagaan LDPM bisa dikatakan merupakan suatu inovasi yang diberikan kepada anggota Gapoktan untuk diadopsi menjadi suatu pilihan dalam tata kelola usahatani yang dimiliki. Namun adopsi menemui kendala karena kesalahan pemahaman pemaknaan dari anggota gapoktan. Diperlukan strategi komunikasi yang tepat dalam menyampaikan aturan-aturan yang dimaksud dalam pelembagaan LDPM. Diperlukan kemampuan *agent of change* dalam mengkomunikasikan maksud dari LDPM apalagi hal ini masih bersifat baru bagi mereka. Pengertian baru tidak sekedar baru diketahui oleh pikiran (kognitif) akan tetapi juga baru karena belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat dalam arti sikap (*attitude*) dan juga baru dalam pengertian belum diterima atau dilaksanakan/diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat (Lestary, 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelembagaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat pada Gapoktan Pemancar belum sepenuhnya melembaga karena anggotanya belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ditawarkan pada program penguatan LDPM tersebut. Norma yang ditawarkan tidak sejalan dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat, namun program LDPM mampu sampai pada tahap kemandirian karena mampu memecahkan salah satu masalah petani yaitu menjaga keseimbangan harga pangan di wilayah tersebut.

Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan agar program pemberdayaan yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat program pemberdayaan yang diberikan secara teknis dapat dilakukan, secara sosial dapat diterima dan secara ekonomi menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. 2008. Tipe Petani dan Strategi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Petani. *Jurnal M'Power Universitas Negeri Surakarta* Vol. 8 No. 8
- Ariningsih, E dan H,P,S,Rahman. 2008. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian Bogor* Volume 6 No. 3 September 2008
- Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2002.
- Basri, M. 2008. Tesis Studi Kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2010. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014.
- Hamyana. 2012. Antara Kelembagaan Petani, Negara dan Kapitalis. STPP Malang. Malang.
- Jokolelono, E. 2011. Pangan dan Ketersediaan Pangan. *Media Litbang Sulteng* IV (2) 88 – 96 Desember 2011.
- Lakitan. B. 2009. Kontribusi Teknologi dalam Pencapaian Ketahanan Pangan. Makalah Utama pada Seminar Hari Pangan Sedunia, Jakarta 12 Oktober 2009.
- Lestary, E. 2009. Adopsi Inovasi sebagai Faktor yang Berperan dalam Perubahan Sosial. *M'Power Universitas Surakarta* Vol. 9 No. 9.

- Kementerian Pertanian. Pedoman Umum Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Badan Ketahanan Pangan tahun 2012.
- Nyak, I. Hermanto, S. D.S, Priyarsono. 2006. Efektifitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Agro Ekonomi* Volume 24 No.2
- Kementerian Pertanian. 2009. Pedoman Umum Pelaksanaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
- Rangkuti, P.A. 2009. Strategi Komunikasi Membangun Kemandirian Pangan. *Jurnal Litbang Pertanian* 28(2).
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Subagio, A. 2005. Tesis Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Undang-Undang Pangan No 19 Tahun 2013
- Witoto. Yusup, N. Martua, S. 2006. *Lumbung Pangan Jalan Menuju Ketersediaan Pangan*. KRKP.